

PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE* PADA INSTANSI PEMERINTAH

Mega Erita

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Implementation of Good Governance in Government Agencies. This study of how the actual implementation of good governance, especially at the Office of National Unity, Politics and Public Protection (Kesbangpolinmas) year from 2012 to 2014 in the city of Dumai. Based on research conducted Kesbangpolinmas Office of Dumai yet implementing or applying the values of good governance in committed, especially against the three main principles, namely, the implementation of principles of participation, transparency and accountability. The method used is a qualitative research method in which one of the research procedures that produce descriptive data and the data obtained more complete, more deeply so that the research objectives can be achieved. The research location is on the Office of National Unity, Politics and Public Protection Dumai. Authors gather research data from several books, government regulations, journals and interviews with informants research that Kesbangpolinmas office clerks, community organizations and political parties. This research resulted in the conclusion that the obstacles in the implementation of good governance at the Office of National Unity, Politics and Public Protection in 2012-2014 in Kota Dumai is internal factors which include officials from the institutions and attitudes. As well as from external factors include CSOs / NGOs and political parties. Therefore, the Office Kesbangpolinmas more attention to performance, whether it is in accordance with applicable regulations. To avoid obstacles in conducting a policy especially related to society.

Abstrak: Pelaksanaan Good Governance pada Instansi Pemerintah. Penelitian ini mengenai bagaimana sesungguhnya pelaksanaan *good governance* khususnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) tahun 2012-2014 di Kota Dumai. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai belum melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai *good governance* secara berkomitmen, terutama terhadap tiga prinsip utama yaitu, pelaksanaan atas prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Lokasi penelitian yaitu pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai. Penulis mengumpulkan data penelitian dari beberapa buku, peraturan pemerintah, jurnal dan wawancara mendalam dengan informan penelitian yaitu Pegawai Kantor Kesbangpolinmas, Ormas dan Parpol. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tahun 2012-2014 di Kota Dumai adalah faktor internal yang meliputi dari lembaga dan sikap pejabatnya. Serta dari faktor eksternal meliputi Ormas/LSM dan Parpol. Oleh karena itu, Kantor Kesbangpolinmas lebih memperhatikan lagi kinerjanya, apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan suatu kebijakan apalagi yang berhubungan dengan masyarakat.

Kata Kunci: *good governance*, prinsip partisipasi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah-daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya sendiri yang telah diberikan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan, tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Harapan utamanya adalah agar

daerah dengan mudah menjalankan pemerintahan di daerah yang berorientasikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga, pemerintahan di daerah juga perlu dikelola dengan sangat baik dan mampu menanggapi, memanfaatkan dan menghadapi tantangan tuntutan *good governance* tersebut secara baik dan benar.

Kota Dumai termasuk memiliki pemerintahan daerah yang peduli akan penciptaan *good governance* di setiap lini pemerintahannya. Salah satu bukti nyata dari kepedulian itu, Kota Dumai

mengikuti suatu kajian umum yang berkaitan dengan penciptaan *good governance* di Provinsi Riau yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Riau. Kajian dilakukan hakikatnya hanyalah bersifat umum dan permulaan serta diharapkan mampu menjadi titik awal melihat kondisi penyelenggaraan pemerintahan dan melakukan pengkajian selanjutnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan ke pemerintahan yang baik khususnya di Kota Dumai

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian yang serius untuk melihat bagaimana sesungguhnya upaya dalam penerapan *good governance* di Kota Dumai, terutama secara khusus di instansi pemerintahan yang ada di lingkungan Kota Dumai. Dikarenakan kajian yang dilakukan oleh Balitbang Provinsi Riau hanya bersifat umum, yaitu hanya melihat aspek penyelenggaraan pemerintahan secara umum saja, tidak spesifik melihat upaya penciptaan *good governance* di instansi pemerintahan di Kota Dumai.

Penulis bermaksud untuk melihat secara khusus pelaksanaan *good governance* di salah satu instansi pemerintahan yang ada pada Kota Dumai. Instansi yang dipilih sebagai objek dalam penelitian ini adalah Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai. Didalamnya terdapat masing-masing bidang yang telah diberikan tugas mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kota Dumai untuk melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, Susunan Organisasi.

Diantara beberapa prinsip *good governance*, terdapat tiga prinsip utama *good governance* yang belum dijalankan secara maksimal

oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai yaitu, prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Untuk itu, penulis memfokuskan meneliti terhadap ketiga prinsip utama *good governance* tersebut.

Kemudian berdasarkan temuan awal atau pengamatan peneliti, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ini dalam menjalankan tugasnya didapati belum melaksanakan atau menerapkan nilai-nilai *good governance* secara berkomitmen, terutama terhadap tiga prinsip utama yang sangat berkaitan dengan tugas-tugas tersebut, yaitu pelaksanaan atas prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Diantara beberapa persoalan atau fenomena yang menjadi masalah dalam penelitian ini, yaitu Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai berdasarkan pengamatan awal dinyatakan belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan prinsip partisipasi. Hal ini dapat terlihat yaitu kurangnya aparatur Kantor Kesbangpolinmas dalam melibatkan Ormas maupun LSM dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja operasional untuk Ormas maupun LSM.

Berkaitan dengan Tupoksi Kantor Kesbangpolinmas dalam melaksanakan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan untuk pengembangan organisasi tersebut dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan dengan mengkoordinir organisasi-organisasi tersebut. Serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, maka Kantor Kesbangpolinmas hendaknya dapat mengunjungi organisasi-organisasi tersebut, dalam melihat perkembangan serta sekaligus mengawasi kegiatan organisasi itu. Kurangnya kerjasama maupun koordinasi dari Kantor Kesbangpolinmas maupun Ormas/LSM akan mengakibatkan kurangnya partisipasi Ormas/LSM dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan organisasi yang diadakan oleh Kantor Kesbangpolinmas tersebut.

Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan prinsip transparansi. Hal ini misalnya dapat dikaitkan dengan Tupoksinya sebagai pengelola administrasi keuangan untuk

Parpol dan Ormas/LSM serta sebagai unsur pendukung tugas kepala daerah yang dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait yang menerima anggaran kegiatan atau bantuan sosial, yang sebelumnya telah direkomendasikan dan ditentukan oleh pihak Kantor Kesbangpolinmas.

Terkait dengan hal tersebut, masyarakat tidak mengetahui pihak-pihak mana saja yang telah ditentukan menerima dana bantuan sosial tersebut. Pada Kantor Kesbangpolinmas tidak adanya terdapat informasi melalui selebaran kertas yang berisikan rincian dana yang ditempelkan pada papan pengumuman. Sehingga menyebabkan tidak adanya kejelasan mengenai nama-nama yang menerima dana serta rincian jumlah dana yang diberikan serta digunakan untuk kegiatan apa saja dana yang telah diperoleh tersebut. Informasi yang seharusnya bisa juga diakses oleh masyarakat melalui situs internet tetapi tidak ada di publikasikan oleh pihak Kantor Kesbangpolinmas tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan atas prinsip transparansi perlu dimaksimalkan lagi mengingat keterbukaan sangatlah penting dalam hal apapun agar tidak terjadi kecurigaan.

Selain itu, Kantor Kesbangpolinmas belum menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas. Hal ini misalnya terkait dengan tugas pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan pelaksanaan tugas. Berdasarkan temuan awal peneliti tidak dijalankan, tidak disiapkan khusus pada tahun yang telah ditentukan. Pada umumnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan pelaksanaan tugas diserahkan pada akhir tahun dan biasanya tepat pada bulan desember. Jika Adapun keterlambatan dalam penyampaian LAKIP, batas waktu nya yaitu sampai tanggal 15 Maret pada tahun berikutnya.

Padahal pembuatan LAKIP maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi tersebut merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan asas akuntabilitas dari pihak Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai khususnya pada bidang yang telah ditentukan. Akuntabilitas dikarenakan adanya nilai-nilai atau

norma-norma eksternal yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Adanya masalah-masalah ini berdasarkan dugaan awal peneliti, bisa saja disebabkan oleh kurang aktifnya Kantor Kesbangpolinmas di dalam melibatkan atau mengikutsertakan kelembagaan politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan dalam kegiatan yang berhubungan dengan mereka. Artinya dalam hal ini dapat diindikasikan bahwa Kantor Kesbangpolinmas belum memiliki sifat partisipasi dan transparansi yang besar dalam mengajak kelembagaan politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan pada kegiatan pembangunan politik dan demokratisasi di Kota Dumai dan juga Kantor Kesbangpolinmas harus lebih menerapkan prinsip akuntabilitas dalam hubungannya dengan publik.

Beberapa permasalahan ini tentunya tidak serta merta kemudian dijadikan sebagai penilaian akhir terhadap kondisi yang terjadi di kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai. Artinya, indikasi mengenai fakta bahwa Kantor Kesbangpolinmas belum memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan *good governance* terutama pelaksanaan atas tiga prinsip utama yang dianggap paling berkaitan dengan tugas yang ada, yaitu prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, belumlah merupakan suatu kebenaran mutlak. Masalah ini tentunya perlu pembuktian lebih lanjut melalui suatu penelitian atau kajian yang lebih serius.

Tuntutan adanya *good governance* karena adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan demokratisasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk menciptakan sistem atau paradigma baru untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan awal. Tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukungnya kelancaran, keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara maupun pembangunan dapat diwujudkan dengan mempraktekkan *good governance* (Adisasmita, 2009).

Masih banyak lagi pengertian *good governance* yang diberikan oleh berbagai pihak. Namun ringkasnya *good governance* diartikan sebagai yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Kata “baik” disini dimaksudkan sebagai kaidah

tertentu dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*. Menurut Ismanto (2005), *good governance* merujuk pada kultur beserta struktur pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di dalam suatu negara, tidak hanya menyangkut lembaga eksekutif, namun seluruh negara yang berhubungan dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini mengenai bagaimana sesungguhnya pelaksanaan *good governance* khususnya pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) tahun 2012-2014 di Kota Dumai.

METODE

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Dumai. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan fakta di lapangan, kajian mengenai *good governance* di Kota Dumai tidak banyak dilakukan. Sementara Kesbangpolinmas Kota Dumai masih terdapat sejumlah kendala internal, terutama belum terlaksananya secara maksimal prinsip-prinsip utama *good governance* seperti pada prinsip partisipasi, prinsip transparansi dan juga prinsip akuntabilitas.

Informan adalah orang yang menjadi sumber data atau orang yang memberikan informasi dalam penelitian. Istilah informan diberikan kepada subjek yang berdasarkan kepada tujuan penelitian dinilai mampu dan memenuhi kriteria sebagai pemberi informasi yang dibutuhkan peneliti sesuai fokus dan tujuan penelitian, sehingga dibutuhkan *key person* untuk mendapatkan informasi yang rinci melalui wawancara langsung. Dalam penelitian ini penulis memilih informan yang dianggap mampu memberikan informasi tentang penelitian yang penulis ungkapkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik deskriptif analisa data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan yang berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi. Setelah seluruh data yang diperlukan telah diperoleh, maka data tersebut diolah secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dalam bentuk tabel-tabel dan

disertai penjelasan-penjelasan, kemudian hal dari pembahasan ini dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Good Governance

Pelaksanaan Indikator Partisipasi

Untuk melihat pelaksanaan prinsip partisipasi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai, maka selanjutnya peneliti telah menetapkan dua sub indikator sebagai tolak ukurnya. Dimana kedua sub indikator tersebut dianggap berkaitan dengan usaha Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai dalam rangka melibatkan Parpol dan Ormas/LSM disetiap aktivitasnya. Kedua Sub indikator tersebut adalah sub indikator melakukan koordinasi dengan Parpol dan Ormas/LSM dan sub indikator melakukan kerjasama dengan Parpol dan Ormas/LSM.

Koordinasi dengan Parpol dan Ormas/LSM dalam Rangka Kegiatan Pembangunan Politik dan Demokrasi

Berdasarkan fakta di lapangan, wujud nyata dari proses koordinasi tersebut adalah koordinasi terprogram dan tidak terprogram. Untuk koordinasi terprogram misalnya telah dituangkan dalam bentuk program kerja dan kegiatan. Sedangkan untuk koordinasi yang tidak terprogram pelaksanaannya tidak diagendakan dan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif, yaitu :

- a. Hubungan langsung
- b. Kesempatan awal
- c. Kontinuitas
- d. Dinamisme
- e. Tujuan yang jelas
- f. Organisasi yang sederhana
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
- h. Komunikasi yang efektif

Kerjasama dengan Partai Politik dan Ormas/LSM dalam Rangka Kegiatan Pembangunan Politik dan Demokrasi

Di lapangan, didapati bahwa proses kerja-

sama yang dilakukan Kantor Kesbangpolinmas adalah sebagai fasilitator bagi Parpol maupun Ormas/LSM. Fasilitator yang dimaksud adalah bahwa Kesbangpolinmas dalam hal kerjasama tersebut hanya berfungsi memfasilitasi Parpol maupun Ormas/LSM dalam rangka kegiatan pembangunan politik dan demokrasi di Kota Dumai. Serta sebagai wujud nyatanya sebagai fasilitator, maka Kantor Kesbangpolinmas menyediakan bantuan keuangan kepada Parpol maupun Ormas/LSM dalam rangka kegiatan pembangunan dan demokrasi tersebut.

Adapun partisipasi Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai terhadap penetapan anggaran, yaitu terhadap Parpol dengan ikut melihat atau memantau Partai mana yang mempunyai suara dan kursi terbanyak. Sehingga hal tersebut menjadi ukuran Kantor Kesbangpolinmas untuk menentukan dana hibah yang didapati oleh Parpol tersebut. Dikarenakan jumlah dana hibah yang diperoleh oleh masing-masing Parpol tidaklah sama, berdasarkan banyaknya kursi pada setiap Parpol.

Pelaksanaan Indikator Transparansi

Dalam rangka melihat pelaksanaan indikator transparansi oleh Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, penulis telah menetapkan dua sub indikator sebagai tolak ukurnya, yang dalam hal ini sangat berkaitan dengan tugas yang dijalankan oleh instansi tersebut. Kedua sub indikator tersebut adalah sub indikator membuka akses yang luas kepada Parpol dan Ormas/LSM dalam melihat informasi keuangan dana hibah dan bantuan sosial serta sub indikator transparan dalam penentuan Ormas/LSM yang menerima dana hibah dan bantuan sosial.

Membuka Akses yang Luas kepada Parpol dan Ormas/LSM dalam Melihat Informasi Pengelolaan Keuangan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai juga bertugas menyalurkan dana hibah dan bantuan sosial yang telah ditetapkan didalam APBD kepada Parpol maupun Ormas/LSM yang ada di Kota Dumai. Hal ini terlihat jelas misalnya dalam salah satu tugas Kebangpolinmas sebagai fasilitator yang dalam hal ini memberikan fasilitas

berupa bantuan keuangan kepada Parpol dan Ormas/LSM tersebut. Bantuan keuangan tersebut tentu saja bersumber dari dana hibah dan bantuan sosial yang memang sudah dianggarkan untuk disalurkan kepada Parpol, Ormas/LSM.

Sudah seharusnya pengelolaan atau penyaluran dana hibah dan bantuan sosial tersebut memenuhi kaidah-kaidah transparansi, yang dalam pengertian paling sederhana adalah keterbukaan. Di dalam kaidah transparansi, instansi pemerintah dituntut untuk mampu memberikan informasi yang jelas dan terbuka dalam setiap aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi. Maka dari itu, pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial yang disalurkan kepada Parpol dan Ormas/LSM juga harus dikelola secara terbuka, dimana tersedianya informasi keuangan yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang terkait penerimaan dana tersebut, yang dalam hal ini adalah Parpol dan Ormas/LSM.

Terbuka dalam Proses Penentuan Partai Politik dan Ormas/LSM yang Memperoleh Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Keberadaan Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai dalam kaitannya Parpol maupun Ormas/LSM, tidak hanya sebatas penyalur dana hibah dan bantuan sosial kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Akan tetapi, Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai juga diberikan kewenangan (menetapkan atau merekomendasikan) dalam menentukan pihak-pihak (Ormas/LSM) mana saja yang ditetapkan sebagai penerima dana hibah dan bantuan sosial. Dikarenakan berdasarkan pengamatan peneliti, tidak semua Ormas/LSM yang ada di Kota Dumai menerima dana bantuan tersebut setiap tahunnya. Oleh karena itu, tentunya dalam proses penentuan pihak-pihak yang mendapat dana hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara transparan, dalam artian pihak Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai harus dapat menjalankan alasan-alasannya secara terbuka kepada semua pihak Ormas/LSM yang ada di Kota Dumai, terutama sekali kepada Ormas/LSM yang diputuskan tidak menerima dana hibah dan bantuan sosial tersebut.

Pelaksanaan Indikator Akuntabilitas

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan asas akuntabilitas yang dilakukan oleh Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, penulis telah menetapkan dua sub indikator sebagai tolak ukurnya, yaitu sub indikator membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan sub indikator membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Parpol maupun Ormas/LSM.

Membuat Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Tugas

Sebagai fasilitator dalam kegiatan pembangunan politik dan demokrasi yang dilakukan oleh Parpol dan Ormas/LSM tersebut, maka Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai bisa melakukan berbagai kegiatan, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan keuangan kepada Parpol maupun Ormas/LSM tersebut, atau dalam bentuk memprakarsai diadakannya pelatihan dan bimbingan kepada Parpol dan Ormas/LSM yang berkaitan dengan proses pembangunan politik dan demokrasi.

Kemudian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai terhadap amanah sebagai fasilitator tersebut, maka konsekuensinya adalah harus dibuat suatu laporan hasil dari kegiatan yang berkaitan dengan proses fasilitasi tersebut. Untuk mengetahui pelaksanaan sub indikator membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitasi Parpol dan Ormas/LSM tersebut. Melihat dari fakta-fakta yang ada, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa indikator yaitu laporan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas tidak dilaksanakan dengan baik. Sebab sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah adalah melakukan apa yang sudah diamanahkan kepadanya tanpa menciptakan alasan-alasan pembenaran bagi tindakan mereka yang tidak menjalankan amanah.

Membuat LAKIP

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Laporan tersebut untuk menggam-

barkan kinerja suatu instansi yaitu gambaran capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa dalam hal pembuatan LAKIP maka Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai secara umum dapat dikatakan belum cukup baik melaksanakan prinsip akuntabilitas karena belum maksimalnya dalam penyiapan LAKIP dan belum bertanggungjawab dalam penyerahan LAKIP, mengingat adanya peraturan kapan seharusnya LAKIP tersebut diserahkan.

Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Good Governance

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis menetapkan dua faktor utama yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pada Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai, yaitu dari faktor internal yang meliputi dari lembaga dan sikap pejabatnya. Serta dari faktor eksternal meliputi Ormas/LSM dan Parpol.

Faktor Internal

Faktor Lembaga

Faktor organisasi dalam hal ini berkaitan dengan adanya masalah di dalam internal organisasi Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai yang menyangkut persoalan mutasi pegawai. Berdasarkan hasil penelitian didapati dan diakui sendiri oleh pejabat terkait bahwa masalah mutasi pegawai yang terjadi di lingkungan Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai secara tidak langsung ikut mempengaruhi upaya pelaksanaan *good governance* pada Kantor tersebut, dan secara nyata hal ini menghambat upaya Kesbangpolinmas dalam membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan sekaligus ikut berpengaruh pada masalah keterlambatan pembuatan atau penyerahan LAKIP.

Faktor Sikap Pejabat

Salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan *good governance* pada Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai adalah berkaitan dengan faktor perilaku atau sikap

pejabat pemerintah yang dalam hal ini belum memiliki komitmen yang kuat dalam upaya perwujudan *good governance* didalam internal organisasinya. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, didapati bahwa Kantor Kesbangpolinmas belum secara terbuka dalam proses penentuan Ormas/LSM yang diputuskan menerima dana hibah dan bantuan sosial, dan juga tidak menyiapkan laporan pelaksanaan tugas maupun LAKIP. Secara umum para pejabat terkait ber alasan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan walaupun terjadi keterlambatan dalam menyiapkan laporan-laporan tersebut. Padahal secara moral setiap pejabat publik juga dituntut senantiasa berupaya untuk menerapkan nilai-nilai yang menjadi karakteristik dalam *good governance* dengan komitmen yang tinggi, walau dengan bobot yang paling kecil sekalipun.

Faktor Eksternal Ormas/LSM

Ormas/LSM diposisikan sebagai pelaku dari struktur kelompok kepentingan yang berfungsi sebagai pengartikulasi kepentingan masyarakat. Artinya, Ormas/LSM berkedudukan sebagai kelompok kepentingan di dalam suatu negara. Bila Mereka melakukan artikulasinya itu secara menekan (memaksa, mengancam, menteror dan sebagainya), maka mereka berkedudukan sebagai kelompok penekan. Keberadaan Ormas/LSM diharapkan dapat dan mampu menjadi perekat kebangsaan. Institusi non pemerintah yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat tersebut dipandang dapat menjembatani antara kepentingan rakyat dan negara. Meskipun gerak langkahnya belum maksimal dalam menjawab kebutuhan rakyat, Ormas/LSM tetap diterima publik

Parpol

Partai politik sebagai pilar utama yang menjadi alat politik rakyat untuk melakukan perubahan, karena partai politik telah dijamin dengan Undang-Undang menjadi media bagi rakyat untuk terlibat dalam kekuasaan. Partai politik digunakan sebagai sarana perubahan kearah yang lebih baik. Kemajuan sebuah bangsa sangat terkait dengan kemajuan pemba-

ngunannya. Pembangunan yang dimaksud tidak terbatas pada pembangunan dalam sektor ekonomi saja, namun lebih dari itu termasuk didalamnya pembangunan dalam sektor politik. Pembangunan politik ini merujuk pada pembangunan dalam skala makro maupun mikro, skala nasional hingga skala daerah. Pembangunan tidak lagi hanya menanti “instruksi” dari pusat melainkan juga mendorong terjadinya pembangunan dari arus bawah, dari pelosok-pelosok desa dan kota/kabupaten.

Pemerintah mengambil peran untuk memberikan keleluasaan bagi warga negara untuk berkreaitivitas dalam mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Kondisi ini menantang lembaga-lembaga demokrasi untuk mampu mengejawantahkan aspirasi masyarakat ke dalam bentuk program-program pembangunan. Terdapat berbagai bentuk pelembagaan demokrasi, salah satunya adalah partai politik. Dalam sistem demokrasi, partai politik memiliki posisi sekaligus peran yang sangat penting. Partai politik dianggap sebagai representasi resmi aspirasi masyarakat, menjadi penghubung antara proses-proses yang terjadi di pemerintahan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

SIMPULAN

1. Pada indikator partisipasi, Kesbangpolinmas Kota Dumai belum cukup baik melaksanakan dua sub indikator yang telah ditetapkan, yaitu dengan melaksanakan sub indikator koordinasi dan sub indikator kerjasama dengan Parpol maupun Ormas/LSM. Dalam hal ini Kantor Kesbangpolinmas belum berupaya semaksimal mungkin dalam kaitannya untuk mengajak serta melibatkan Parpol dan Ormas/LSM untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kesempatan dan kegiatan pembangunan politik di Kota Dumai.
2. Pada indikator transparansi, Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai belum dengan cukup baik melaksanakan dua sub indikator yang telah ditetapkan, yaitu dengan melaksanakan sub indikator membuka akses informasi pengelolaan keuangan dana hibah dan bantuan sosial secara luas kepada Parpol dan Ormas/LSM serta melaksanakan sub indikator

transparan dalam proses penetapan Ormas/LSM yang memperoleh dana hibah dan bantuan sosial.

3. Pada indikator akuntabilitas, Kantor Kesbangpolinmas Kota Dumai juga belum melaksanakan dua sub indikator yang telah ditetapkan, yaitu melaksanakan sub indikator membuat LAKIP dan membuat laporan pelaksanaan tugas. Hal tersebut dilakukan, hanya saja belum melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Laporan tidak diselesaikan tepat waktu, sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan tersebut. Maka dari pihak Kesbangpolinmas itu sendiri belum dengan sungguh-sungguh bertanggungjawab terhadap pekerjaannya dan juga belum dengan baik melaksanakan prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas.

DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, Rahardjo. 2009. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Jakarta: Graha Ilmu
- Dwiyanto, Agus. 200. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gajahmada University Press : Yogyakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Good Governance dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara
- Ismanto, Gandung. 2005. *Membangun Good Governance dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Daerah*. Semarang: Fisip Untirta
- Mulyadi, Deddy. 2008. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali
- Nawawi, Zaidan. 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali
- Ndraha, Taliziduhu. *Ilmu Pemerintahan Baru*. 2003. Jakarta: Rineka Cipta
- Rasyid, Ryaas. 2007. *Makna Pemerintah (Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan)*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Sumarto, Hetifah. 2009. *Partisipasi, Inovasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sedarmayanti. 2005. *Good Governance (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance)*. Bandung: Mandar Maju
- Wasistiono, Sadu. 2003. *Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Widjaja, A.W. 2005. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.